



Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Paling Diminati Warga

YOGYA (MERAPI) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta (DP3AP2KB) mencatat kepesertaan Keluarga Berencana (KB) aktif di Kota Yogyakarta per Desember 2025 mencapai 58,19 persen dari total 36.853 pasangan usia subur (PUS).

Kepala Bidang KB dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti, mengatakan angka tersebut menunjukkan proporsi PUS yang masih aktif menggunakan alat dan metode kontrasepsi hingga akhir tahun 2025. "Sepanjang 2025, tercatat 1.979 PUS menjadi akseptor KB

baru. Angka ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program KB terus bertambah," ujarnya, Rabu (25/2).

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih mendominasi di Kota Yogyakarta. Jenis yang paling banyak dipilih adalah IUD (alat kontrasepsi dalam rahim). "Sejak dulu kalau di tingkat DIY, Kota Yogyakarta paling tinggi memang MKJP, terutama IUD," jelas Herristanti.

Selain IUD, penggunaan implan juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, minat terhadap Metode Operasi Pria (MOP) meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan ini tidak lepas

dari sosialisasi berjenjang melalui kader KB di tingkat kementren, kelurahan hingga RT, serta pemanfaatan momentum seperti Hari Keluarga Nasional, Hari Kontrasepsi Sedunia, dan Hari Ibu.

DP3AP2KB juga menghadirkan inovasi berupa insentif bagi peserta kontrasepsi mantap (MOP dan MOW) melalui dukungan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan APBD. Program bertajuk 'Sarung Tomi' (Satu Juta untuk MOP dan MOW) memberikan insentif Rp1 juta bagi peserta yang memenuhi syarat, sebagai kompensasi pengganti biaya hidup sementara serta mendukung pemulihan pascatindakan.

"Khusus MOP dan MOW, reward

ini kami berikan bagi warga ber-KTP dan berdomisili Kota Yogyakarta. Antusiasmenya meningkat, bahkan tahun lalu kuota harus ditambah," ungkapnya. Meski demikian, layanan kontrasepsi secara umum tetap terbuka bagi masyarakat luar kota. Untuk MKJP seperti IUD dan implan, warga luar daerah tetap dapat dilayani dengan koordinasi antarwilayah untuk pencatatan data.

Herristanti menambahkan, layanan KB rutin di fasilitas kesehatan kini justru lebih efektif dibanding kegiatan massal. Sejumlah puskesmas dan klinik membuka layanan KB secara berkala dan dapat mengklaim dana operasional melalui BOKB. "Karena layanan

rutin tersedia, masyarakat punya banyak pilihan. Jadi kegiatan massal satu hari kadang tidak terlalu ramai," jelasnya.

Untuk kontrasepsi mantap (MOP/MOW), DP3AP2KB menerapkan proses skrining ketat. Pertimbangannya meliputi usia istri tidak lebih dari 49 tahun, jumlah anak umumnya lebih dari dua, tidak memiliki balita, kondisi keluarga harmonis, serta adanya persetujuan kedua pasangan melalui informed consent. "Karena ini kontrasepsi mantap, pasangan benar-benar harus sudah mantap tidak ingin menambah anak. Tidak semua permintaan bisa langsung disetujui, ada proses skrining dan konsultasi," tegasnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005